

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan (development planning) merupakan suatu bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang (developing country) yang mengutamakan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi menuju perubahan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang bertujuan pemerataan pembangunan ekonomi dan hasilnya berdampak baik kepada seluruh masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengembangkan dan mendukung masyarakat ikut terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu UMKM mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Sektor UMKM merupakan penggerak ekonomi negara dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan sekaligus membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun 2019. Jumlah itu meningkat 1,98% dibandingkan pada tahun 2018 yang sebanyak 64,2 juta unit. Jika dirinci, maka jumlah usaha mikro pada tahun 2019 mencapai 64,6 juta. Sebanyak 798,7 ribu unit merupakan usaha kecil. Sementara, ada 65,5 ribu unit berbentuk usaha menengah. Adapun, jumlah UMKM tersebut setara dengan 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Sementara usaha besar hanya mencapai 0,01% dari total unit usaha di dalam negeri, UMKM juga menyerap 119,6 juta orang atau 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia. Angka ini meningkat 2,21% dari tahun sebelumnya yang sebesar 116,9 juta orang. Kemudian, UMKM menyumbangkan 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku. Terhadap PDB atas harga konstan, kontribusi UMKM mencapai 57,14%. Sementara, ekspor nonmigas yang berasal dari UMKM mencapai 339,2 triliun pada tahun 2019. Jumlah itu mencapai 15,65% dari total ekspor Indonesia pada dua tahun lalu (Badan Pusat Statistik, 2019).

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang banyak diminati di masyarakat Indonesia dan memiliki perkembangan yang sangat baik. Potensi besar yang dimiliki UMKM diharapkan dapat mendukung perekonomian di Indonesia. UMKM yang dikelola dan dikembangkan dengan baik tentunya akan mewujudkan sektor usaha yang tangguh. Sektor usaha yang tangguh harus didukung dengan administrasi yang baik.

Namun, para pelaku UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Salah satu kesulitan yang di hadapi para pelaku UMKM yaitu terkendala dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM yang ada saat ini belum melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dianjurkan dalam melakukan kegiatan usahanya. Banyak para pelaku UMKM yang masih mengabaikan untuk tidak melakukan pencatatan yang sesuai

dengan standar akuntansi keuangan dalam kegiatan usaha mereka, karena terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan.

Demi terpenuhinya kebutuhan informasi bagi UMKM maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2009 menyusun dan mensahkan Standar yang diadopsi dari International Financial Reporting Standard For Small Medium Enterprises (IFRS For SMEs) yang lebih sederhana yaitu standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Namun mulai pada saat di sahkan hingga sekarang masih menunjukkan belum maksimal dalam mengimplementasikan SAK ETAP oleh para pelaku usaha. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya dan terbatasnya pengetahuan dan kurangnya informasi yang dapat menghasilkan rendahnya motivasi untuk menerapkan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi.

Pada tanggal 24 Oktober 2016 DSAK IAI menyusun dan mensahkan kembali exposure draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) . Standar ini ditetapkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Manfaat yang diharapkan dari penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang sudah ditetapkan adalah untuk menyediakan informasi keuangan dan kinerja yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik bagi investor atau kreditor, serta wujud pertanggung jawaban dari suatu entitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Penerapan SAK EMKM ini juga dapat digunakan untuk memperoleh pembiayaan dari pemerintah sehingga UMKM menjadi lebih berkembang.

Penelitian ini dilakukan di Toko Bangunan Prima Jaya, yang merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan. Toko Bangunan Prima Jaya ini sangat banyak dikenal masyarakat di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Karena bahan bangunan yang disediakan untuk dijual kualitasnya sangat bagus. Toko Bangunan Prima Jaya merupakan UMKM dengan kriteria usaha kecil, yang memiliki omzet Rp. 150.000.000 per bulan (berdasarkan dari informasi pemilik usaha). Namun, Toko Bangunan Prima Jaya ini belum melakukan pencatatan atas laporan keuangan dan entitas ini menganggap bahwa membuat laporan keuangan sangatlah rumit, karena kurangnya pemahaman tentang SAK EMKM. Oleh sebab itu pemilik tidak mengetahui apakah kegiatan usaha memperoleh laba/rugi. Selama ini pemilik usaha hanya mengetahui sebatas uang masuk dan uang keluar saja. Hal tersebut yang membuat Toko Bangunan Prima Jaya lebih fokus untuk mengembangkan usahanya daripada belajar teknologi informasi.

Para pelaku UMKM membutuhkan laporan keuangan dalam mengembangkan sebuah usaha agar menjadi lebih maju. Agar dapat mengembangkan sebuah usaha, para pelaku UMKM dapat melakukan kerja sama (menarik investor) untuk mendapatkan modal dan mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan. Tetapi dalam mendapatkan pinjaman harus mengikuti aturan ataupun syarat- syarat yang berlaku dari pihak pemberi pinjaman adapaun syarat yang harus dipenuhi yaitu menunjukkan laporan keuangan dan kinerja dari usaha tersebut. Agar pihak pemberi pinjaman ataupun investor yang ingin memberi modal untuk usaha tersebut dapat melihat kelayakan pinjaman dengan menganalisis dan mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Desain Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil, dan Menengah pada Toko Bangunan Prima Jaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana desain penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada Toko Bangunan Prima Jaya.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat desain penerapan pada laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

1.4 Kontribusi / Manfaat Tugas Akhir

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Toko Bangunan Prima Jaya maupun peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk diaplikasikan sebagai bahan panduan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, sehingga bisa memberikan informasi keuangan usaha tersebut.
2. Meningkatkan kesejahteraan terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh Toko Bangunan Prima Jaya
3. Meningkatkan kemajuan usaha pada Toko Bangunan Prima Jaya
4. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ekspansi dalam hal peningkatan dan memperluas usaha kegiatan Toko Bangunan Prima Jaya secara lebih besar
5. Diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama